



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

9 Maret 2026

KEARIFAN BUDAYA NUSANTARA SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN NEGARA

Pendahuluan

Pembangunan negara sering dibicarakan dalam bahasa angka: pertumbuhan ekonomi, investasi, infrastruktur, produktivitas, daya saing, dan pendapatan per kapita. Semua itu penting. Namun, ada satu fondasi lain yang sering kurang mendapat tempat setara dalam wacana pembangunan, yakni kebudayaan. Padahal, negara tidak dibangun hanya dengan semen, baja, anggaran, dan teknologi. Negara dibangun di atas manusia yang hidup dalam nilai, simbol, ingatan kolektif, tata pergaulan, bahasa, etika, dan cara pandang tentang kehidupan bersama. Dalam konteks Indonesia, fondasi itu sangat kaya, sebab Indonesia bukan masyarakat tunggal, melainkan masyarakat kepulauan yang dibentuk oleh ratusan kelompok suku, bahasa, tradisi, dan sistem pengetahuan. Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa Indonesia memiliki ratusan nama suku bahkan ribuan bila dirinci sampai subsuku, dan klasifikasi SP2010 menghasilkan 633 kelompok suku besar. BPS juga menunjukkan bahwa Indonesia sangat heterogen atau majemuk, tetapi tidak terpolar secara ekstrem. Fakta ini memberi isyarat penting: keberagaman budaya Indonesia bukan sekadar latar belakang pembangunan, melainkan bahan dasarnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam perkembangan kebijakan nasional, budaya tidak lagi dipandang sebagai ranah pinggiran. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kesederajatan, dan gotong royong. Tujuannya antara lain mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Rumusan ini memperlihatkan bahwa kebudayaan tidak ditempatkan sebagai dekorasi pembangunan, tetapi sebagai salah satu instrumen strategis untuk membangun bangsa secara utuh. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Gagasan itu semakin relevan ketika Bappenas, dalam arah pembangunan jangka menengah 2025–2029, menekankan bahwa pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada tiga pilar: pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dimengerti sebagai peningkatan kapasitas individual, tetapi juga sebagai penguatan jaringan nilai, solidaritas, dan karakter sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam bahasa lain, negara membutuhkan bukan hanya sumber daya manusia yang pintar, tetapi juga masyarakat yang berakar, mampu bekerja sama, dan memiliki orientasi moral bersama. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Di tingkat global, UNESCO menegaskan bahwa untuk pertama kalinya Agenda 2030 mengakui peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Budaya dipandang bukan hanya sebagai objek yang dilindungi, melainkan sebagai penggerak manfaat sosial dan ekonomi, sekaligus enabler yang meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan. UNESCO juga menempatkan budaya secara lintas sektor, mencakup pertumbuhan, pengetahuan, inklusi sosial, lingkungan, pemuda, serta perdamaian dan dialog. Artinya, pembicaraan tentang

budaya sesungguhnya adalah pembicaraan tentang kualitas pembangunan itu sendiri. ([UNESCO](#))

Dalam konteks Indonesia, kearifan budaya Nusantara dapat dipahami sebagai himpunan nilai, norma, praktik, pengetahuan lokal, dan cara hidup yang telah dibentuk melalui pengalaman sejarah panjang berbagai komunitas di seluruh kepulauan. Kearifan ini hadir dalam aneka bentuk: gotong royong, musyawarah, ritus syukur, tata kelola air dan lahan, sistem persaudaraan lintas komunitas, seni pertunjukan kolaboratif, kerajinan yang sarat makna, sampai pengetahuan pengobatan, pelayaran, dan pendidikan nonformal lintas generasi. Karena itulah, pembahasan tentang kearifan budaya Nusantara sebagai fondasi pembangunan negara bukanlah romantisasi masa lalu. Ia adalah pembacaan strategis atas sumber daya sosial yang sudah hidup dalam masyarakat dan dapat menjadi basis bagi tata kelola, pendidikan, ekonomi kreatif, integrasi nasional, bahkan ketahanan menghadapi perubahan. (budaya.data.kemdikbud.go.id)

Esai ini berargumen bahwa kearifan budaya Nusantara merupakan fondasi pembangunan negara karena sekurang-kurangnya menjalankan lima fungsi besar. Pertama, ia membentuk etika sosial dan karakter kolektif. Kedua, ia memperkuat kohesi, solidaritas, dan integrasi bangsa. Ketiga, ia menyediakan model kelembagaan sosial yang relevan bagi tata kelola pembangunan. Keempat, ia menjadi sumber inovasi, ekonomi kreatif, dan daya saing kultural. Kelima, ia menjaga relasi yang lebih seimbang antara manusia, alam, dan masa depan. Dengan kata lain, jika pembangunan negara ingin kokoh, maka fondasi budaya tidak bisa dibiarkan rapuh. ([UNESCO](#))

1. Memahami kearifan budaya sebagai fondasi, bukan sekadar ornamen

Kearifan budaya sering disalahpahami hanya sebagai adat istiadat lama atau kebiasaan tradisional yang indah tetapi tidak relevan bagi zaman

modern. Pemahaman ini terlalu sempit. Dalam kerangka pemajuan kebudayaan, budaya mencakup unsur-unsur yang jauh lebih luas: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Ini berarti bahwa budaya menyentuh cara manusia berpikir, berorganisasi, belajar, bekerja, menyembuhkan, menyelesaikan konflik, dan berhubungan dengan alam. Maka, ketika kita berbicara tentang kearifan budaya Nusantara, yang kita maksud bukan hanya tarian, pakaian, atau upacara, melainkan keseluruhan kecerdasan sosial yang diwariskan oleh komunitas-komunitas Indonesia dalam mengelola kehidupan.

(budaya.data.kemdikbud.go.id)

Dalam perspektif pembangunan, fondasi adalah sesuatu yang menopang struktur lain di atasnya. Infrastruktur fisik, misalnya, membutuhkan fondasi teknis agar bangunan tidak runtuh. Demikian pula pembangunan negara memerlukan fondasi sosial-moral agar kemajuan ekonomi dan politik tidak rapuh. Sebuah negara mungkin bisa tumbuh cepat secara ekonomi, tetapi bila masyarakatnya kehilangan kepercayaan, solidaritas, disiplin kolektif, penghormatan terhadap keragaman, dan etika tanggung jawab, maka pertumbuhan itu mudah berubah menjadi konflik, ketimpangan, atau fragmentasi. Kearifan budaya berperan justru di level mendasar ini: ia membentuk habitus bersama yang membuat kehidupan kolektif menjadi mungkin. (UNESCO)

Karena itu, budaya tidak dapat diposisikan semata sebagai sektor tambahan sesudah pembangunan "utama" selesai. Dalam pengalaman banyak masyarakat, justru budaya yang menentukan apakah pembangunan diterima, diadaptasi, atau ditolak. Jalan yang dibangun negara akan dipelihara jika ada rasa memiliki. Program pendidikan akan berhasil jika selaras dengan bahasa dan pengalaman hidup masyarakat. Kebijakan lingkungan akan lebih efektif bila bertemu dengan norma lokal mengenai tata kelola alam. Kesehatan publik akan lebih mudah diterima ketika institusi mampu berkomunikasi lewat saluran sosial yang

dipercaya. Ini semua menunjukkan bahwa budaya bekerja sebagai medium yang menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan sosial.

([UNESCO](#))

Di sinilah konsep modal sosial menjadi penting. Bappenas secara eksplisit menempatkan modal sosial budaya sebagai salah satu pilar pembangunan manusia seutuhnya. Dalam praktiknya, modal sosial merujuk pada kepercayaan, norma timbal balik, dan kemampuan bekerja sama yang hidup dalam masyarakat. Kearifan budaya Nusantara adalah salah satu produsen utama modal sosial itu. Tradisi gotong royong, musyawarah, persaudaraan adat, dan mekanisme sosial berbasis komunitas membuat masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada kontrol formal negara. Mereka memiliki kemampuan internal untuk mengatur diri, menyelesaikan masalah, dan bergerak bersama. Negara modern tetap penting, tetapi negara akan jauh lebih kuat bila ditopang oleh masyarakat yang memiliki cadangan modal sosial budaya.

(perpustakaan.bappenas.go.id)

2. Lanskap kebudayaan Indonesia: luas, hidup, dan terus bergerak

Kekuatan argumen tentang budaya sebagai fondasi pembangunan di Indonesia lahir dari kenyataan objektif bahwa lanskap budaya negeri ini memang sangat luas. BPS menunjukkan bahwa hasil pengelompokan data suku SP2010 menghasilkan 633 kelompok suku besar. BPS juga menegaskan bahwa Indonesia sangat heterogen. Ini berarti bahwa pembangunan di Indonesia selalu berlangsung dalam masyarakat majemuk. Tak ada kebijakan nasional yang sepenuhnya "netral budaya"; semua kebijakan pada akhirnya akan bersentuhan dengan ragam kebiasaan, identitas, dan struktur sosial masyarakat yang berbeda-beda.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Keragaman itu makin terlihat bila kita meninjau bahasa. Badan Bahasa menyebut terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia. Hingga 2024, seluruh provinsi telah melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah,

dan 114 bahasa daerah telah direvitalisasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa bahasa ibu bukan hanya warisan budaya, tetapi fondasi bagi terbentuknya bahasa persatuan dan bagian dari identitas nasional. Bahkan, pembelajaran dengan bahasa daerah pada tingkat awal terbukti meningkatkan pemahaman literasi, terutama bagi anak-anak di daerah 3T. Data ini penting karena menunjukkan bahwa bahasa daerah bukan hambatan bagi pembangunan; ia justru jembatan untuk pembangunan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berakar. ([Kemendikdasmen](#))

Kekayaan budaya Indonesia juga tercermin dalam pengakuan internasional. Hingga saat ini, laman resmi UNESCO untuk warisan budaya takbenda mencatat 16 elemen Indonesia yang terinskripsi, termasuk batik, angklung, wayang, keris, noken, tiga genre tari tradisional Bali, pinisi, pencak silat, gamelan, jamu, Reog Ponorogo, kolintang, kebaya, dan pantun. Selain itu, terdapat pula nominasi berjalan seperti Mak Yong dan budaya tempe. Fakta ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia bukan hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga memiliki signifikansi universal. Akan tetapi, yang lebih penting daripada pengakuan global itu adalah kenyataan bahwa unsur-unsur budaya tersebut tetap hidup dalam jaringan sosial, ekonomi, pendidikan, dan simbolik masyarakat Indonesia. ([ICH UNESCO](#))

Dari sini kita dapat melihat satu hal mendasar: budaya Nusantara bukanlah museum yang membeku. Ia hidup, berubah, bernegosiasi dengan modernitas, dan dalam banyak kasus justru menyediakan sumber daya adaptasi. Karena itu, ketika pembangunan negara dibayangkan sebagai proses transformasi menuju masa depan, budaya tidak perlu dipertentangkan dengan kemajuan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelola transformasi agar modernisasi tidak memutus masyarakat dari akar nilai dan pengetahuan yang justru menopang daya tahannya. UNESCO sendiri menekankan perlunya pendekatan lintas sektor yang menghubungkan budaya dengan pendidikan, pertumbuhan,

perdamaian, lingkungan, dan inklusi sosial. Pandangan ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia. ([UNESCO](#))

3. Kearifan budaya sebagai pembentuk etika sosial dan karakter bangsa

Pembangunan negara tidak pernah murni persoalan teknis. Ia selalu juga persoalan moral. Negara memerlukan warga yang mau taat pada aturan, menjaga ruang publik, menghormati perbedaan, bekerja dengan disiplin, dan memikirkan kepentingan bersama. Semua disposisi ini tidak muncul secara otomatis dari sekolah formal atau regulasi. Banyak di antaranya dibentuk terlebih dahulu oleh budaya. Keluarga, komunitas, ritus, bahasa, dan kebiasaan lokal menanamkan rasa malu, rasa hormat, kewajiban sosial, dan tanggung jawab kolektif. Itulah sebabnya kearifan budaya adalah pembentuk karakter yang sangat mendasar. ([UNESCO](#))

Salah satu contoh yang sangat sentral dalam filsafat sosial Indonesia adalah gotong royong. Dalam sebuah publikasi resmi diplomasi Indonesia, gotong royong dijelaskan sebagai tenet inti dalam falsafah Indonesia, secara harfiah "to carry together", yakni kerja sama timbal balik untuk tujuan bersama. Pengertian ini tampak sederhana, tetapi implikasinya sangat besar. Gotong royong mengajarkan bahwa kehidupan bersama tidak dibangun di atas atomisasi individual, melainkan atas kesadaran bahwa beban dan tujuan publik perlu dipikul secara kolektif. Bila nilai ini hidup, pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada paksaan dari atas. Ada dorongan moral dari bawah untuk ikut menjaga kepentingan bersama.

Gotong royong penting bukan hanya karena ia sering disebut sebagai nilai nasional, tetapi karena ia memiliki banyak versi lokal dalam masyarakat Nusantara. Walau namanya berbeda-beda, intinya serupa: kerja bersama, saling membantu, tanggung jawab timbal balik, dan penghargaan terhadap kebersamaan. Nilai ini membentuk karakter sosial yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi krisis, bencana, dan

kesulitan ekonomi. Dalam pembangunan desa, misalnya, semangat gotong royong dapat menurunkan biaya koordinasi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dalam pendidikan, ia menguatkan kerja kelompok dan solidaritas. Dalam politik, ia menjadi dasar etika anti-eksklusivisme. Dengan demikian, gotong royong bukan sekadar slogan nostalgia, melainkan etika pembangunan.

Kearifan budaya juga membentuk karakter melalui bahasa. Pemerintah menegaskan bahwa bahasa ibu adalah bagian dari peradaban bangsa yang membentuk identitas nasional. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga wadah nilai. Cara suatu komunitas menamai hubungan kekerabatan, mengekspresikan hormat, membedakan ranah sakral dan profan, atau merumuskan nasihat moral, semua itu membentuk cara anggotanya menafsirkan dunia. Ketika bahasa daerah melemah, bukan hanya kata-kata yang hilang, tetapi juga cara pandang dan etika hidup yang dikandungnya. Karena itu, revitalisasi bahasa daerah sesungguhnya juga merupakan investasi dalam pembentukan karakter bangsa. ([Kemendikdasmen](#))

4. Kearifan budaya sebagai perekat kohesi sosial dan persatuan nasional

Dalam negara majemuk, pembangunan memerlukan bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga kohesi. Tanpa kohesi sosial, kemajuan mudah terganggu oleh konflik identitas, kecurigaan antarkelompok, atau kompetisi yang merusak rasa kebangsaan. BPS mengingatkan bahwa perubahan komposisi suku di suatu wilayah dapat menjadi potensi konflik sosial, ekonomi, dan politik bila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, keberagaman bukan sesuatu yang otomatis indah. Ia perlu dipelihara melalui nilai dan pranata yang memungkinkan perbedaan hidup berdampingan secara produktif. Di sinilah kearifan budaya memainkan peran yang sangat penting. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Salah satu contoh menonjol adalah pela gandong di Maluku. Dalam penjelasan resmi Kementerian Agama Provinsi Maluku, pela dan gandong disebut mampu menjadi perekat kekuatan, membangkitkan semangat persaudaraan, membentuk karakter anak bangsa, berkontribusi menciptakan identitas diri sebagai masyarakat yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi benteng untuk mencegah lahirnya konflik komunal. Nilai ini penting karena memperlihatkan bagaimana pranata budaya lokal dapat menjalankan fungsi yang sangat strategis bagi integrasi sosial: ia bukan hanya mempertahankan identitas komunitas, tetapi juga membangun jembatan antarkelompok yang berbeda. (<https://maluku.kemenag.go.id/>)

Kasus pela gandong memberi pelajaran berharga. Di banyak teori politik modern, perdamaian sering dibayangkan sebagai hasil dari institusi formal semata. Namun dalam praktik masyarakat, perdamaian sering lebih kokoh bila ditopang oleh memori persaudaraan, kewajiban adat, dan rasa malu kolektif untuk mengkhianati ikatan sosial. Dengan demikian, pranata budaya lokal bisa menjadi mekanisme rekonsiliasi dan pencegahan konflik yang tidak tergantung oleh hukum positif saja. Negara yang cerdas bukan menggusur pranata-pranata semacam itu, melainkan mengakuinya sebagai bagian dari arsitektur sosial.

Kesimpulan

Kearifan budaya Nusantara pada hakikatnya bukan unsur tambahan dalam pembangunan negara, melainkan salah satu fondasi terdalam yang menopang keberlanjutan kehidupan berbangsa. Pembangunan yang hanya bertumpu pada indikator ekonomi, perluasan infrastruktur fisik, atau modernisasi administratif tanpa memperhitungkan kekuatan budaya akan mudah kehilangan akar sosialnya. Dalam konteks Indonesia

yang sangat majemuk, pembangunan selalu berlangsung di tengah masyarakat yang dibentuk oleh ratusan kelompok suku, bahasa, adat, serta sistem pengetahuan lokal. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dan masyarakat untuk membaca, menghargai, dan mengintegrasikan kearifan budaya ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan. BPS menegaskan tingginya kemajemukan etnis Indonesia, sementara kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menempatkan pemajuan kebudayaan sebagai langkah strategis untuk memperteguh jati diri bangsa, persatuan nasional, dan kesejahteraan rakyat.

Dari pembahasan sebelumnya dapat ditegaskan bahwa kearifan budaya Nusantara mengandung fungsi-fungsi sosial yang sangat relevan bagi pembangunan negara. Ia membentuk etika sosial, rasa tanggung jawab, disiplin moral, kebiasaan musyawarah, semangat gotong royong, dan penghormatan terhadap kehidupan bersama. Nilai-nilai ini tidak selalu hadir dalam bentuk regulasi formal, tetapi hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Justru karena sifatnya yang membumi, ia bekerja efektif sebagai pengikat masyarakat. Dalam bahasa pembangunan, kearifan budaya menghasilkan modal sosial: kepercayaan, norma timbal balik, dan kemampuan bekerja sama. Bappenas sendiri menempatkan pembangunan modal sosial budaya sebagai salah satu pilar pembangunan manusia seutuhnya dalam RPJMN 2025–2029. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya urusan identitas, tetapi juga urusan kapasitas bangsa untuk membangun secara kolektif.

Kearifan budaya juga terbukti memiliki daya strategis dalam menjaga kohesi sosial dan integrasi kebangsaan. Dalam masyarakat majemuk, persatuan tidak dapat dibangun hanya melalui struktur politik formal. Persatuan memerlukan pengalaman sosial yang memungkinkan perbedaan hidup berdampingan dalam rasa hormat dan solidaritas. Di sinilah pranata budaya lokal seperti gotong royong, persaudaraan adat, mekanisme musyawarah, dan tradisi kolektif lainnya menjadi sangat

penting. Kebudayaan menyediakan bahasa sosial untuk membangun rasa "kita" yang tidak mematikan keragaman. Karena itu, pembangunan negara yang sehat bukan pembangunan yang menyeragamkan, melainkan pembangunan yang menyatukan melalui pengakuan. Semakin budaya lokal dihormati sebagai bagian sah dari kebudayaan nasional, semakin kokoh legitimasi sosial negara di mata warganya. Prinsip ini sejalan dengan asas toleransi, keberagaman, partisipasi, dan gotong royong dalam UU Pemajuan Kebudayaan.

Selanjutnya, esai ini juga menunjukkan bahwa kearifan budaya Nusantara memiliki relevansi praktis dalam tata kelola pembangunan. Banyak pranata lokal pada dasarnya adalah hasil pengalaman historis masyarakat dalam mengelola sumber daya, membagi peran, menyelesaikan konflik, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan keteraturan sosial. Karena itu, budaya tidak boleh diperlakukan sebagai benda mati atau simbol eksotis belaka. Ia harus dibaca sebagai sumber pengetahuan praktis yang dapat memperkaya desain kebijakan publik. Pandangan UNESCO tentang budaya sebagai penggerak dan sekaligus pemungkin pembangunan berkelanjutan sangat penting di sini. Budaya tidak hanya memberi manfaat sosial dan ekonomi secara langsung, tetapi juga meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan karena membuat kebijakan lebih kontekstual, lebih diterima, dan lebih berakar pada realitas masyarakat.

Di samping itu, kearifan budaya Nusantara merupakan sumber penting bagi pembangunan ekonomi yang lebih bermakna. Dalam era ekonomi kreatif dan persaingan global yang semakin bertumpu pada identitas, pengalaman, dan diferensiasi, kekayaan budaya Indonesia adalah aset strategis. Namun, nilai ekonomi budaya hanya akan berkelanjutan bila tetap terhubung dengan komunitas pemilikinya, dengan makna yang dikandungnya, dan dengan sistem pewarisan yang menjaganya tetap hidup. Budaya yang diputus dari komunitasnya akan menjadi komoditas kosong; sebaliknya, budaya yang dikelola secara adil dapat menjadi

sumber kesejahteraan yang bermartabat. Karena itu, arah pembangunan nasional perlu memberi tempat yang lebih kuat bagi ekonomi budaya, pendidikan berbasis budaya, revitalisasi bahasa daerah, dan diplomasi budaya sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan nasional dan berbagai platform resmi negara telah menunjukkan bahwa modal sosial budaya memang perlu diposisikan sebagai kekuatan transformasi bangsa.

Akan tetapi, penting ditegaskan bahwa kearifan budaya tidak otomatis menjadi fondasi pembangunan hanya karena ia diwarisi dari masa lalu. Ia harus terus dirawat, ditafsirkan ulang, dan dihubungkan dengan tantangan zaman. Globalisasi, homogenisasi budaya, melemahnya bahasa daerah, komersialisasi berlebihan, dan politisasi identitas adalah ancaman nyata yang dapat menggerus fungsi sosial budaya. Karena itu, tugas negara bukan sekadar melestarikan budaya dalam arti konservatif, tetapi menciptakan ekosistem agar budaya tetap hidup, adaptif, dan produktif. Ini mencakup pendataan yang baik, perlindungan hukum, dukungan pendidikan, penguatan komunitas budaya, pengakuan terhadap pranata lokal, serta integrasi budaya dalam perencanaan pembangunan. Kebudayaan yang hanya dipajang tidak akan menjadi fondasi; kebudayaan baru menjadi fondasi ketika ia hidup dalam tindakan, lembaga, dan kesadaran sosial masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **kearifan budaya Nusantara merupakan fondasi pembangunan negara** karena ia menyediakan dasar etik, sosial, simbolik, dan praktis bagi kehidupan kolektif Indonesia. Ia membentuk karakter warga, memperkuat solidaritas, memperhalus relasi antara negara dan masyarakat, memperkaya tata kelola, membuka peluang ekonomi kreatif, dan membantu bangsa menjaga keseimbangan antara kemajuan dengan keberlanjutan. Dalam negara kepulauan yang majemuk seperti Indonesia, pembangunan yang berjangka panjang hanya akan kokoh apabila bertumpu pada budaya yang hidup. Pembangunan bukanlah

proses meninggalkan akar budaya demi menjadi modern, melainkan proses mentransformasikan warisan nilai, pengetahuan, dan kebijaksanaan lokal menjadi energi kemajuan nasional. Oleh sebab itu, masa depan Indonesia tidak cukup dibangun dengan investasi material semata; ia juga harus dibangun dengan investasi kebudayaan. Di situlah pembangunan memperoleh jiwa, legitimasi, dan daya tahannya.

Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka gaya APA 7** yang dapat langsung ditambahkan ke naskah "*Kearifan Budaya Nusantara sebagai Fondasi Pembangunan Negara*." Istilah yg dipilih diselaraskan dengan kerangka regulatif Indonesia, konsep pembangunan sosial-budaya, serta contoh kearifan lokal yang dipakai dalam uraian sebelumnya. ([BPK Regulation](#))

Glosarium

Kearifan budaya — himpunan nilai, norma, pengetahuan, dan praktik hidup yang berkembang dalam suatu komunitas dan diwariskan lintas generasi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. ([BPK Regulation](#))

Nusantara — keseluruhan ruang kepulauan Indonesia yang mencakup keragaman suku, bahasa, adat, seni, dan sistem pengetahuan lokal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pemajuan kebudayaan — upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun peradaban. ([BPK Regulation](#))

Modal sosial budaya — kapasitas sosial yang lahir dari nilai bersama, kepercayaan, solidaritas, dan praktik budaya yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Gotong royong — nilai kerja bersama, tolong-menolong, dan tanggung jawab kolektif demi kepentingan bersama; merupakan salah satu inti etika sosial Indonesia. ([BPK Regulation](#))

Kohesi sosial — tingkat keterikatan, rasa saling percaya, dan solidaritas dalam masyarakat yang menopang ketertiban, kerja sama, dan persatuan. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Keragaman budaya — keberadaan banyak ekspresi budaya, bahasa, adat, seni, dan identitas etnik dalam satu ruang kebangsaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bahasa daerah — bahasa ibu yang hidup dalam komunitas tertentu dan menjadi medium pewarisan identitas, memori, nilai, dan pengetahuan lokal. ([Kemendikdasmen](#))

Revitalisasi bahasa daerah — langkah pelestarian dan penguatan kembali penggunaan bahasa daerah melalui pendidikan, komunitas, dan kegiatan budaya agar tetap diwariskan kepada generasi muda. ([Kemendikdasmen](#))

Warisan budaya takbenda — praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen budaya yang diakui sebagai warisan hidup suatu komunitas. (budaya.data.kemdikbud.go.id)

Subak — sistem pengelolaan air dan pertanian Bali yang berlandaskan kerja sama komunitas dan filosofi *Tri Hita Karana*, serta menjadi contoh tata kelola sumber daya yang demokratis dan berkelanjutan. ([UNESCO World Heritage Centre](#))

Tri Hita Karana — filosofi Bali yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. ([UNESCO World Heritage Centre](#))

Pela gandong — pranata persaudaraan sosial-budaya di Maluku yang berfungsi memperkuat solidaritas, kerukunan, dan pencegahan konflik antarkomunitas. (<https://maluku.kemenag.go.id/>)

Angklung — alat musik bambu Indonesia yang menuntut permainan kolaboratif antarpemain; karena itu sering dipahami juga sebagai simbol kerja sama, disiplin, dan saling menghormati. ([ICH UNESCO](#))

Batik — warisan budaya Indonesia berupa teknik, simbolisme, dan praktik tekstil yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat dari lahir hingga meninggal. ([ICH UNESCO](#))

Noken — tas anyaman khas Papua yang memiliki fungsi sosial, simbolik, dan ekonomi, serta terkait dengan ikatan kekerabatan dan kerja komunitas. ([ICH UNESCO](#))

Pembangunan berkelanjutan — pembangunan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar kebutuhan masa kini terpenuhi tanpa merusak masa depan. ([UNESCO](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Analysis Function. (2021, July 13). *Social capital harmonised standard*. ([UNESCO](#))

Badan Pusat Statistik. (2015, November 18). *Mengulik data suku di Indonesia*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2021, January 21). *Hasil sensus penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.* ([BPK Regulation](#))

Kementerian Agama Provinsi Maluku. (2022, February 20). *Kearifan lokal pagar kerukunan beragama di Maluku.* (<https://maluku.kemenag.go.id/>)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, March 1). *Wamendikdasmen mendukung revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya pelestarian identitas bangsa.* ([Kemendikdasmen](#))

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *Budaya Kita.* (budaya.data.kemdikbud.go.id)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029: Ringkasan.* (perpustakaan.bappenas.go.id)

UNESCO. (n.d.). *Cultural landscape of Bali Province: The Subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana philosophy.* ([UNESCO World Heritage Centre](#))

UNESCO. (n.d.). *Indonesian angklung.* ([ICH UNESCO](#))

UNESCO. (n.d.). *Indonesian batik.* ([ICH UNESCO](#))

UNESCO. (n.d.). *Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua.* ([ICH UNESCO](#))

UNESCO. (2023, May 11). *Thematic factsheet: Culture & sustainable development.* ([UNESCO](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Kearifan Budaya Nusantara sebagai Fondasi
Pembangunan Negara*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 9 Maret 2026
Prompting on Writer's account (Rudy C Tarumingkeng)

<https://chatgpt.com/c/69aeaf84-ce58-8399-87ec-eeecdcbd66738>